

# Melacak Geneologi *Credo* (Ke)Polisi(an)

Sutrisno<sup>1</sup>



## Abstrak :

*Tulisan ini merupakan pembacaan sejumlah credo kepolisian secara "beyond". Bukan untuk mengatakan keusangan sebuah credo namun usaha melacak credo dalam kompatibilitasnya dari sudut ruang dan waktu. Pembacaan semacam ini acapkali terjebak pada resiko "kegenitan" logika. Sebagaimana kritik balik kaum positivist atas penganut Post-mo, yaitu; "kritik--tanpa solusi". Penggunaan nama Richard Rorty – yang oleh sebagian kalangan disebut nihilis – dalam konteks ini mendapatkan relefansi moral melalui logika sintetiknya. Penggunaan Rorty disini dan semacam ini tentu mengundang diskusi.*

**Kata Kunci :** *Melindungi dan Melayani, Polisi, Aman*

## Avant Propos;

Antara 'struktur-teks' dan 'struktur interaksi'

**K**aum strukturalis sangat percaya bahwa perilaku (*behavior*) dan tindakan sosial (*social action*) bisa dipotret dari cara (ber)bahasa. Ekstrimnya, perilaku manusia itu sendiri adalah bahasa, tidak lain. Kalau peneliti melakukan pengamatan, hasilnya pun dituangkan dalam bahasa; jadi, ya, menganalisa bahasa<sup>2</sup>. Struktur perilaku manusia adalah rentetan huruf yang tertuang di atas kertas. Kaum post strukturalis dan interaksionis simbolik *wanti-wanti* adanya kesalahan mendasar yang dikandung kaum strukturalis. Prinsip yang ingin dikatakannya, bukan bahasa yang mengerangkeng orang menjadi sebuah struktur perilaku, tetapi "bargaining" dalam interaksi tatap muka-lah yang menjadi *mesin perilaku* itu 'bekerja' membangun dan mengisi struktur. Dengan demikian, 'struktur' yang dimaksud kaum strukturalis dipandang terlalu longgar oleh kaum interaksionis simbolik. Struktur ini mudah goyah melalui interaksi tatap muka. Meminjam tata fikir **Michael**

1. Dr. (C). Sutrisno, M.Si; Pengajar *Sosiologi* dan *Filsafat* pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK, Jakarta. Sedang meneliti perihal Kekuasaan. Beralamat di triznovdi@yahoo.com.

2. Emile Durkheim (selain Levi Straus) adalah monumental untuk ilustrasi ini, di sepanjang karyanya yang menjadi exemplar sosiologi berasal dari membolak-balik etnografi yang ditulis orang lain dari pedalaman Australia. Diantara temuan yang menggugah adalah bahwa agama adalah (konstruksi) fakta sosial; "Yang Sakral" adalah adalah produk masyarakat.

**Foucault** (1926–1984), tindakan manusia bukan diformat oleh bahasa tetapi berasal dari negosiasi yang digerakkan oleh energi yang bermukim di perut dan yang ada dibawahnya. Disini Foucault berhutang budi pada **Karl Marx** (1818), yang mengatakan bahwa kunci untuk memahami kenyataan social tidak ditemukan dalam ide-ide abstrak. Yang mau dikatakannya, sumber nilai tak bisa lagi ditemukan dari literatur teks suci dan khotbah pemuka agama, dan apel pagi dimana nilai luhur itu dibaca lantang. Meminjam **Erving Goffman** (1922 –1982); apel pagi, kitab suci, seminar-seminar, adalah drama tentang ‘siapa memerankan apa dan harus *ngomong* apa’. Bagi Foucault bahasa yang dirumuskan diatas kertas adalah symbol bersemayamnya nilai ideal, tapi nilai faktualnya terletak pada interaksi sehari-hari. “Pancasila”, “Tri Brata”, “Catur Prasetya” dan seterusnya adalah nilai – nilai ideal yang mudah ditemukan di buku-buku teks (dan apel pagi); sementara interaksi sosial sebagai nilai faktual adalah soal lain. Interaksi social tatap muka mempunyai strukturnya sendiri yang seringkali mampu membengkokkan nilai ideal yang tertuang dalam tulisan. Bisa jadi persoalannya bermukim pada deretan kata-kata suci itu, karena layaknya sebuah norm adalah simplistik, padahal interaksi social begitu komplek: ada *gesture*, ada komponen perut dan yang dibawahnya. Keduanya itu (*gesture* dan kebutuhan perut dan bagian bawahnya) adalah instrument untuk ‘mendamaikan’ perseteruan antara teks suci dengan perilaku. Ini adalah cara pembacaan **Sigmund Freud** (Lahir 1856). *Ego*<sup>3</sup>, kata Freud adalah bentukan dari aktifitas social individu sebagai hasil “perdamaian” atas peperangan antara *Id* dengan *Super Ego*. *Id* adalah ‘perut dan bagian bawahnya’; *Super Ego* adalah ‘teks suci’ yang dirumuskan masyarakat.

Maka penelusuran sejumlah kredo kepolisian di bawah ini bukan otomatis sebuah pembacaan potret perilaku atau tindakan polisi, sebagaimana keyakinan kaum strukturalis. Bisa jadi polisi yang baik tidak memahami sejumlah teks kredo sakral *njelimet* kepolisian yang akan diurai di bawah ini; tapi tentu polisi yang buruk adalah karena tidak faham *credo* atau abai terhadap *credo*. Meminjam **Robert Peels**, polisi yang baik cukup memahami *credo* kemanusiaan universal dimana didalamnya bermukim hati nurani; sebuah ruang pengkhidmatan pada kemanusiaan. Ber-polisi akhirnya adalah persoalan ber-hati nurani ketimbang soal regulasi, remunerasi, dan permainan kata-kata dalam sejumlah kredo yang rumit dan *njelimet*<sup>4</sup>.

### Perihal “Sipil”

Kurang dari satu bulan setelah jatuhnya Suharto, Mei 1998, Satjipto Rahardjo

3. *Ego* dalam konteks ini dibaca sebagai karakter dan attitude seseorang yang tampil dalam ruang sosial.

4. Proposisi ini diilhami dari sebuah kisah. Seorang sahabat bertanya kepada Muhammad SAW tentang baik dan benar. Muhammad tak mengalamatkan bahwa yang baik dan benar adalah yang keluar dari mulutnya, bukan pula pada tulisan-tulisan apapun itu, tetapi berasal “dari dalam dadamu sendiri!”. Mungkin ini sebangun; *inna kalamullahu la shautin wa la harfin*, kalam Tuhan itu tak berbunyi dan tak berhuruf.

menulis ihwal sipil pada profesi polisi<sup>5</sup>. Melekatkan kata 'sipil' didepan kata polisi pada dekade ini relatif masih mencengangkan, andaikan Satjipto mewacanakannya ketika Kopkamtib yang dibentuk pada 3 Oktober 1965 masih bercokol barangkali jalan cerita karirnya akan lain. Melalui penelusuran teoritik 'hitam-putih' khasanah kata sipil (civil) dapat ditemukan pada konstruksi literatur negara demokrasi; bahwa hanya dua entitas perbendaharaan kata: sipil dan militer. Tak ada jenis mahluk lain yang berada diantara dua entitas ini, kecuali dengan sebutan 'para militer'. Sipil, mengikuti cara penelusuran Pak Tjip, berasal dari kata Romawi *civilis* yang berasal dari *civis*, yang arti harfiahnya berhubungan dengan 'rumah'. Farouk Muhammad<sup>6</sup> mengelaborasi kata sipil dengan cara *mengawinkannya* dengan kata "*adab*", sebuah istilah Arab. *Civility* berarti *Keadaban*. Penggunaan istilah arab barangkali karena jenderal bintang dua ini agak *sholeh*, atau acap menyimak orasi Nurcholis Madjid yang getol mendakwahkan kata ini dan menerjemahkan konsep *Civil Society* dengan *Masyarakat Beradab*. Namun, kata *adab* dalam konteks publik di Indonesia telah mengalami reduksi seakan-akan sejajar dengan *etiket*. Kesantunan dan mengerti "unggah-ungguh" adalah wilayah etiket. Beradab menyangkut dimensi etika universal, moral universal. Disini prinsip HAM dan aneka Konvensi Jenewa mendapatkan relevansinya; sementara etiket tak menyentuh persoalan yang prinsip ini.

Kembali mengikuti jalan fikiran Pak Tjip, *sipil* berarti "kembali ke rumah", kepada yang semestinya dan makna yang senada. Masalahnya adalah, apa yang dimaksud "rumah" bagi polisi Indonesia? <sup>7</sup> Pak Tjip mengalamatkan kata *rumah* ini pada 'masyarakat'. Jadi, rumah polisi adalah masyarakat, bukan 'militer'; ini pula yang menjadi dasar teoritik **Robert Peels** (1788 –1850). Namun demikian, cara Pak Tjip mengalamatkan makna "rumah" polisi Indonesia pada *masyarakat* secara hirtoris masih menyesakn pertanyaan. Pendekatan histori – sosiologis *mewanti wanti* pembedaan antara nilai ideal (ideal value) dengan nilai faktual (*factual value*). Pak Tjip menggunakan Robert Peels untuk menjawab pertanyaan dimana letak "rumah" polisi Indonesia, jawaban Peels dalam kerangka ini dapat dikategorikan sebagai *idol value*. Cara semacam ini tak masalah dalam kerangka *verstehen*-nya Max Weber, karena berguna sebagai dimensi cara prediktif (dan preskriptif). Namun, tentu saja jawaban pertanyaan di atas, faktualnya harus dicari pada realitas sejarah. Ini sekedar hipotesa: kalau dicari di balik sejarah, yang dimaksud 'rumah' oleh polisi Indonesia adalah militer, kalau tidak rezim kekuasaan! Dan, Bhayangkara yang menjadi

5. Lihat, Anton Tabah (edt.):1998;21. Tulisan Satjipto adalah salah satu kumpulan tulisan dalam buku Anton ini. Satjipto Rahardjo menulis artikel perihal Sipil ini tertanggal 30 Juni 1998, sayang sekali Anton Tabah (editor) dalam mengkompilasi salah satu tulisan Satjipto ini tanpa diberi keterangan atau penjelasan dalam rangka apa tulisan Pak Tjip ini dibuat. Dugaan saya tulisan Satjipto yang dilengkapi daftar pustaka ini adalah sajian dalam sebuah seminar terbatas.

6. Mohon ma'af kepada Farouk Muhammad, penangkapan gagasan ini hanya didasarkan pada ingatan penulis dalam sebuah diskusi kecil ketika beliau masih aktif memimpin PTHK.

7. Sayangnya Pak Tjip kurang mengelaborasi pertanyaan ini. Elaborasi tulisannya kemudian dilakukan secara deduktif – normatif dengan merujuk UU. 13/1961, dan mendasari tulisannya dengan mengacu pada Wiliam Ken Muir (1977).

'logo' kepolisian Indonesia mempunyai makna "yang menakutkan". Secara etimologis terdiri dari dua suku kata, *bhabaya* dan *ingkari*. Tentu, masih perlu penelusuran lebih jauh, apakah dua kata ini (*bhabaya* dan *ingkari*) merupakan sebutan yang berasal dari kalangan rakyat yang dialamatkan kepada penjaga kekuasaan Raja Majapahit 'yang menakutkan' itu. Kalau hipotesa ini bisa diterima maka bhayangkara memang merupakan obyek yang menakutkan kalangan rakyat.

Hipotesa kedua, kata ini (*bhabaya* dan *ingkari* = *bhayangkara*) adalah kata generik yang dibangun oleh Prajurit Majapahit sebagai bagian dari system konsep untuk melindungi rakyat (masyarakat). Bangunan logika dalam hipotesa ini kecil kemungkinannya dibandingkan hipotesa pertama. Karena, misalnya, dengan mengajukan pertanyaan; bahaya dari apa? Dari kriminalitas? Maksudnya, bila warga masyarakat diganggu warga lain – sebagai tindakan criminal – pasukan bhayangkara datang? Tidak, bukan ini konteksnya. Yang dimaksud bahaya bagi kalangan rakyat Majapahit itu datang dari kekuasaan (baca= otoritas kekuasaan). Bahaya dari kriminalitas mungkin bisa, tetapi yang dimaksud 'kriminalitas' adalah tindakan yang, lagi-lagi, membahayakan otoritas kekuasaan. Untuk duduknya konsep kriminalitas di Indonesia perhatikan **James** (2000). Seluk beluk kata ini menurut penelusuran antropologis James dibangun secara politis. Jadi, lagi-lagi muaranya untuk merayakan kekuasaan. Tentu, karena sejarah Indonesia adalah sejarah kekuasaan, bukan cerita soal rakyat. Maka, bisa jadi gagasan Polisi Sipil yang dikenalkan di Indonesia, yang gigih ditulis oleh darah keturunan Mataraman, Satjipto Rahardjo, sesungguhnya a-historis. Namun, merujuk pada tata fikir **Richard Rorty**, seorang epistemolog pragmatisme kontemporer Amerika, kata 'a-historis' ini bersifat profokatif. Karena historisitas hanyalah sebuah peristiwa dalam derajat waktu yang kontinum; maka 'yang a-historis' bisa mudah di-historis-kan sejauh di-kontinum-kan; sekarang, besok dan lusa. Menarik, Rorty melacak asal – usul persetujuan intersubjektif seluas mungkin; bahwa obyektivitas bukanlah masalah yang berkaitan dengan obyek, melainkan kerja sama yang diraih bersama subyek lain (Adi Amin:2003;25).

### Perihal "Aman"

Kunarto, mantan Kepala Polri (1991 –1993) berujar bahwa polisi pada dasarnya menyandang tugas kenabian (profetis). Peralnya, tugas kepolisian, *to serve and protect* (plus mengayomi) berhenti pada satu titik bernama (rasa) 'aman'. Dalam pijakan normativnya kata ini selalu dilekati term "dinamik"; prinsipnya '*mengawal kondisi social – ekonomi yang dinamik*'. Poin ini penting untuk membedakan kondisi social yang mencekam (=social stagnation) dengan kondisi aman yang dinamik. Masyarakat yang *diam* (stagnasi)<sup>8</sup> belum

8. Masyarakat bisa "diam" dibawah otoritarian-despotik namun justru polisi tidak (bisa) bekerja dalam kondisi ini. Pada era Rezim Orde Baru yang bekerja justru lembaga ekstra yudisial semacam Kopkamtib dan Bakortanas.

tentu aman karena tidak dinamik. ‘Dinamik’ mensyaratkan hadirnya elemen-elemen demokrasi: adanya opponent (oposisi) atas rezim politik. Dan, tentu lain cerita bila polisi digunakan untuk membungkam oponent. Dalam organisasi sipil (semacam kepolisian) tak perlu menyebut istilah opponent, namun barangkali substitusinya adalah “ruang kontestasi gagasan”<sup>9</sup>. Di lain sisi, penerimaan terhadap opponent mensyaratkan keterbukaan informasi, selain kerangka dasar kedaulatan sipil. Substansi kedaulatan sipil adalah bahwa otoritas bukan terletak pada hirarkhi (pangkat/ jabatan) tetapi pada teks-teks aturan main. Pengertiannya control tidak lagi bersifat hirarkhi, maka dalam konteks inilah istilah ‘komandan’ tidak lagi relevan di dunia kepolisian.

Kembali pada term “aman”, secara simantik dan filosofis tak pernah ada polemik panjang lebar pada term ini. Cukup melalui pembatiran (*verstehen*<sup>10</sup>) bahwa term ini merupakan derivasi bahasa arab. Dan, agaknya segala yang berbau Timur Tengah ini dekat dengan ikhwal profetis<sup>11</sup>. Disadari atau tidak penelusuran hermenetik konsep ‘aman’ ini telah membangun eksklusi sosial; seakan – akan konsep ini hanya relevan didekati dari sudut epistemologi kalangan agama tertentu. Seorang pensiunan jenderal polisi rajin melacak kata ‘aman’ ini di bongkahan Al Qur’an dan kitab hadist. Ini (memang) pekerjaan *iseng*, tapi di kepalanya berisi motif pengabdian pada profesinya. Untungnya eksklusivisme itu tak serius di tubuh kepolisian. Mengapa? Paling tidak ada tiga hipotesa. Hipotesis pertama, karena Pancasila telah merasuk tulang sumsum para pemikir ( baca: *opinion leader*) kepolisian. Hipotesis semacam ini rasanya terlalu mewah. Hipotesis kedua, karena kata ‘aman’ berasal dari komunitas Tuhan Satu; dan mayoritas pemikir kepolisian pasti penganut Tuhan Satu yang merupakan ‘import’ dari Timur Tengah ini. Hipotesis ini dibangun dari kerangka berfikir Ali Asghar (lihat *foot note* 11) dan Sanderson. Kalau hipotesis ini diteruskan argumentasi selanjutnya adalah bahwa penganut Tuhan asal

9. Istilah ini tak perlu difahami sebagai demokrasi “gaya Senayan-an” seperti hari ini, dimana oleh sejumlah kalangan menyebutnya sebagai kehilangan keadabannya.

10. Istilah bahasa Jerman ini digunakan Max Weber sebagai sebuah metode, namun dalam tulisan ini cukup difahami sebagai penangkapan makna kata secara apresiatif-estetis; “pembatiran”. Sulit menemukan padanan kata *versteben* ini dalam bahasa inggris maupun bahasa Indonesia.

11. Meminjam cara berfikir Ali Ashgar Engineer (1999), seorang Sosiolog Pakistan, bukan sekedar Timur Tengah gudangnya nabi, yang paling adalah prinsip negeri berbahasa Arab ini merupakan wilayah *ikon* lahirnya Tuhan satu. Masyarakat ber-Tuhan satu mencirikan dimensi ‘dominatif’. Ajaran “Tuhan Satu” mau tak mau menyandang gelar agama misi; karena tanpa rasa *rikuh* mengatakan bahwa masyarakat yang tuhaninya banyak salah, misinya “harus di-Satu-kan”. Hari ini merupakan keunggulan dominasi ajaran Tuhan Satu itu. Tak kalah dominatifnya dengan gagasan Barat tentang demokrasi; bahwa yang anti- *primus inter pares* adalah system rendahan, karena itu pantas disebut terbelakang. Sepanjang karya monumental Max Weber pada dasarnya berangkat dari elaborasi tesis semacam ini; “Tuhan Satu” yang berasal dari Timur Tengah itu tumbuh besar di Eropa mendominasi orang – orang penganut tuhan-tuhan local, ini pesan yang terselip dalam *Protestan Ethic and Spirit Capitalism*. Meskipun “Tuhan Satu” di Eropa ini impor dari Timur Tengah tapi warna asal nya cenderung kabur. Pengkotbah kaum kristiani lebih akrab dengan bahasa inggris ketimbang bahasa asal-usul agama ini dilahirkan, hal yang berbeda dengan kalangan pengkhotbah muslim. Mungkin tepatnya, Timur Tengah hanya tempat numpang lahir Kristen, selebihnya ia disusui oleh Barat. Kapitalisme (dan demokrasi) akhirnya harus dikatakan sebagai anak yang lahir dari rahim orang-orang penganut Tuhan Satu. Di Indonesia tesis ini mendapatkan artikulasi paling vulgar, bahwa hanya orang yang mempercayai Tuhan Satu – lah yang boleh hidup di tanah nusantara ini. *Frederich Nietzsche* tak terlalu tepat menyebut “The God is dead” kecuali ia mengamalkan pada tuhaninya orang-orang pribumi.

Timur Tengah (apapun agamanya) telah akrab dengan terminologi yang berasal dari wilayah bahasa yang sama. Argumentasi penjelasan hipotesis semacam ini cukup logis tetapi tentu tidak cukup rasional<sup>12</sup>. Hipotesis ketiga, pemikir kepolisian tidak mempunyai tradisi pecah-belah hanya gara-gara sebuah kata. Pemikir kepolisian Indonesia tak pernah baradu argumen secara agak keras seperti layaknya di Senayan (hal yang memang tak perlu!), atau dalam sebuah panel yang berhadap-hadapan. Yang terjadi hanyalah sebuah desiminasi atau “sosialisasi”. Tak berlebihan kalau dikatakan non-discursiv. Kalau hipotesis ini diterima masih ada dua kemungkinan; Pertama, mereka adalah para pragmatis, dan kedua, kontestasi gagasan-lah yang absen dalam interaksi.

Tapi, mungkin sebuah keberuntungan tersendiri bagi manusia Indonesia yang tidak mempunyai tradisi tarik menarik pada geneologi kata-kata. Tak ada artefak empirik bahwa dalam berorganisasi negara diwarnai keriuhan perihal penggunaan kata (diksi). Disini manusia Indonesia bisa mengatakan *what is in a name!* Lagi pula, sejak Colombus menginjakkan kaki di tanah Amerika genuinitas kata-kata tidak lagi relefan. Hampir tak lagi ada kata *genuine*, yang ada adalah kata yang dibangun secara *hybrid*. *Founding Fathers* bangsa ini memberikan contoh moral yang monumental. Sekitar 83 tahun lalu puluhan anak muda berkumpul di Jalan Kramat Raya No. 106 merumuskan sesuatu yang sangat prinsip bagi perjalanan komuitas bangsa ini. Rapat dipimpin anak muda kelahiran Tuban, **Sugondo Joyopuspito**. Sebagian dari peserta rapat yang masih menggunakan *blangkon* itu bersepakat mengangkat bahasa yang bukan bahasanya untuk dijadikan bahasa persatuan, yang kemudian lahir Sumpah Pemuda. Manusia hari ini sulit membayangkan bagaimana struktur isi kepala dibalik *blangkon* itu. Sekitar tujuhbelas tahun kemudian terjadi debat ulet *Founding Fathers* kita pada pencantuman “syariat islam” dalam Undang Undang Dasar, dua kata ini bukan sekedar menyangkut diksi tetapi implikasi mendasar pada tatanan social diskriminatif.

### Perihal “Mengayomi”

Selain tak mempunyai padanan yang pas dalam bahasa Inggris, juga tidak ada literatur serius yang mengelaborasi kata yang berasal dari bahasa Jawa ini, kecuali dapat ditemukan pada filosofi lambang keraton Yogyakarta<sup>13</sup>. Kunarto, Kepala Polri yang sempat lima setengah tahun jadi ajudan Suharto, menjelaskan term “mengayomi” ini secara

12. Sekedar catatan bahwa dua instrument ini (logik dan rasional) tidak selalu “bersahabat”. Logik menyangkut pertanggungjawaban keruntutan penarikan kesimpulan premis (mayor dan minor), sementara rasional adalah pengecekan kemasuk-akalan pada setiap premisnya.

13. Pada lambang keraton Yogyakarta untuk bisa **mengayomi** makhluk yang didalamnya dibutuhkan dinding/selimut (dilambangkan dengan sayap) dan juga atap (dilambangkan dengan mahkota). Pada sebuah alamat <http://kolomkita.detik.com> diungkap kekisruhan otonomi Yogya, “Penolakan rakyat terhadap penghapusan monarki, seakan cerminan kerinduan rakyat tentang makna “pengayoman”. Rakyat butuh diayomi. Pertanyaannya, mana yang lebih bisa mengayomi? Presiden atau raja?”

alegoris. Konsep mengayomi, menurutnya merujuk pada perumpamaan ayam betina yang mengerami telurnya; Ia (rela) berpuasa sembari sangat hati – hati melindunginya hingga menetas, dan bisa sangat galak pada kucing pengganggu yang sebelumnya ia takuti.

Penjelasan alegoris gaya Kunarto tentu bukan tafsir harga mati, masih terbuka ruang untuk didiskusikan. Paling tidak, misalnya menyangkut kontestasinya dengan arus utama gagasan masyarakat (negara) modern yang merujuk pada format demokrasi. Cukup besar sejumlah kalangan mengabaikan kontestasi term “mengayomi” dalam struktur masyarakat demokratis. Barangkali pengabaian ini bersembunyi dibalik argumen longgarnya makna term mengayomi itu sendiri. Tak seperti credo yang lain, “mengayomi” merupakan konsep yang paling longgar dan lentur, mungkin tepatnya sublim. Dengan wataknya yang “longgar” dan lentur ini Penulis berpandangan kedepan akan menjadi PR paling rumit diselesaikan ketika suatu masa mesin birokrasi membutuhkan akurasi dalam pengukuran (akuntabilitas). Tak heran, pernah ada wacana untuk melikuidasi konsep “mengayomi” ini sebagai salah satu credo Polri.

Konsep “mengayomi” dibaca sebagai derivasi dari gagasan negara integralistik, sebuah konsep ‘tata negara’ yang digagas Hegel dan seorang filsuf yang paling dirujuk Albert Einstein, Spinoza<sup>14</sup>. Konsep Hegelian dipandang telah usang dalam kerangka *mainstream* modernitas. Hegel menganalogikan negara sebagai keluarga. Presiden (pemerintah) sebagai Bapak; dan rakyat sebagai anaknya. Bagi Hegel tak dikenal pemisahan negara dan masyarakat (baca; individu). Individu lebur dalam negara. Negara adalah ‘ruh’ individu. Kriteria (bahkan moralitas) manusia atau individu yang baik adalah ketika ia bisa meleburkan dirinya dengan negara. Bersebarangan dengan Hegelian, adalah pandangan **Alexis de Tocqueville**, belakangan mendapat suntikan kalangan liberalis. Max Weber berada dalam posisi ini. Mereka berpandangan negara hanyalah komunitas kecil yang lahir -- *conditio sine qua non* -- dari rahim masyarakat<sup>15</sup>; Dalam perkembangannya negara tumbuh menjadi monster yang menerkam induknya sendiri. Kaum liberalis ingin mengembalikan posisi negara (*konon katanya*) pada khittahnya. *Allahu'alam bishawab!*).

Kembali pada alegori Kunarto di atas, polisi adalah ayam; masyarakat adalah telur (baca; anaknya). Ayam bertugas melindungi anaknya; anak *manut* induknya. Dalam praksisnya tentu seorang / seekor induk atau bapak tak pernah salah. “*Wong tuwo ora nganti njrumusake anak, Tole!*” (orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya).

Persoalannya, secara demografi-politik manusia Indonesia kelahiran tahun 70-an

14. Sejumlah Indonesianis berpendapat faham ini diadopsi Sukarno, Muhamad Yamin dan Supomo dalam merumuskan dasar negara. Marsilam Simanjuntak dalam bukunya “Negara Integralistik” memperkuat pandangan ini.

15. Negara dipandang sebagai entitas kecil yang diserahi mandat oleh masyarakat untuk mengurus apa-apa yang dipandang ‘sakral’ oleh masyarakat.

sudah sulit menangkap aroma integralistik Hegelian itu. Mereka adalah 'mahluk politik baru' yang dilahirkan dalam suasana redupnya manifesto komunisme; sehingga isi perut dan bagian bawahnya (istilah Foucault) berbeda dengan generasi demografi-politik sebelumnya. Suasana redupnya manifesto komunis ini penting kaitannya dengan *episteme* integralistik karena antara integralisme dengan komunisme dan variannya merupakan saudara sepupu. Manusia baru ini memahami bahwa opponent (oposisi) atas negara adalah berkah agar ruang pasar terbuka lebar. Maka, bukan perkara aneh aktifis kiri tahun 90-an ini meneriakkan anti-pasar sembari menghisap rokok Marlboro.

### Penutup

Semangat tulisan ini diilhami artikel kecil Dawam Rahardjo tentang kehidupan koperasi di Indonesia beberapa minggu lalu di sebuah harian. Katanya, bangsa Indonesia yang terkenal kental azas *credo* gotong royong – ironis -- bukan lahan yang subur bagi tumbuhnya koperasi yang justru memerlukan azas gotong royong. Dawam mempunyai data amat kuat, bahwa koperasi justru tumbuh subur di negeri – negeri yang tak pernah meneriakkan *credo* gotong royong. Mengapa? Persoalannya tentu bukan terletak pada *credo* itu, namun lebih tepat dialamatkan pada tata kelola untuk mendekatkan praktek dengan *credo*. Terselip pesan moral epistemolog-pragmatisme Richard Rorty; *pertama*, bahwa tak perlu 'kecil hati' dengan a-historisitas sebuah *credo* yang ditempelkan pada institusi kepolisian. Ketika a-historisitas dikontinumkan maka peristiwa ini menjadi historis. Disini Rorty sekaligus ingin mengatakan bahwa nilai moral terletak pada tindakan "*di sini*" dan "*hari ini*", bukan "*di luar sana*" (pada teks, misalnya). *Kedua*, kesejatan polisi terletak pada keteguhan keberpihakan—pengkhidmatannya-- kepada kemanusiaan. Tanpa harus tersinggung menyaksikan serangan terhadap non-human (teks, *credo*, atau agama dan keyakinan sekalipun); ia hanya tersinggung pada kemanusiaan yang induktif-empirik. Maka, *ketiga*, pengkhidmatan pada kemanusiaan ini acap kali harus bersahabat dengan praksis-pragmatik ketimbang simbol kegagahan kata-kata, 'kepriyayian', selimut regulasi, dan remunerasi. *Keempat*, srtuktur atau wadah perilaku acapkali terlalu 'maju' ketimbang interaksi nyata (kultur). Dalam sejarah peradaban ummat manusia kesenjangan antara struktur dan kultur dijabatani oleh kehadiran satu – dua manusia 'profetik' ; ia adalah sejenis manusia yang nekat dan asketik (*out of fashion*) . Barangkali terdapat pada **jenis mentalitas manusia** semacam Amrozi, Imam Samodra, Kartosuwiryo, Tan Malaka, Gus Dur, tentu juga Hoegeng, dan seorang Kapolsek nun jauh di pelosok yang tak pernah terjamah kendaraan bermotor. (\*)



## Daftar Pustaka

- Amin, Adi.2003. *Richard Rorty; Pendiri Pragmatisme Kontemporer*, Teraju, Mizan, Bandung.
- Berger, Peter L dan Hansfried Kellner.1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*, terj. Herry Joediono, LP3ES, Jakarta.
- Delue, Steven M.1997. *Political Thinking, Political Theory, and Civil Society*, Allyn & Bacon, USA.
- Djamin, Awaloedin, at al.2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia*, (Tanpa Penerbit)
- Engineer, Asghar Ali.1999. *Asal – Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi, Pustakab Pelajar, Yogyakarta.
- Eldridge, J.E.T. (edt.). 1971. *Max Weber; The Interpretation of Social Reality*, Charles Scribner's Son, New York.
- Foucault, Michael. *The Subject of Power*, dalam Kate Nash (Edt.).2000. *Reading in Contemporary Political Sociology*, Blackwell, London.
- Kunarto.1997. *Erika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto.2002. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Siegel, James T.2000. *Penjahat Gaya Orde Baru; Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, terj. Nor Cholis, LKiS, Yogyakarta.
- Tabah, Anton (edt.).1998. *Reformasi Kepolisian*, Pen. CV. Sahabat, Klaten, Jawa Tengah.